

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadi, Abu; dan Narkubo, Cholid. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2014.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press), 2017.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2019.
- Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), 2016.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press), 2018.
- Kansil, C.S.T.; dan Kansil, Christine S.T. *Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2018.
- MPR, Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi. Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), 2012.
- Marbun, SF.; dan Mahfud, Moh *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty), 2017.
- Marzali, Amri. *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2017.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka), 2017.
- Parwadi, Redatin. *Sosiologi Pembangunan*, (Yogyakarta: Kanisius), 2019.
- Soehino. *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty), 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada), 2016.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2018.

HR, Syaukani; Gaffar, Afan; dan Rasyid, M. Ryaas. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2023, hlm. 19.

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.

Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama), 2018.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak.

Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

## **C. Sumber Lainnya**

Hernadi Affandi, “Problematika Pengelolaan Jalan di Era Otonomi Daerah: Kewenangan *Versus* Kemampuan”, *Jurnal Konstituen*, Vol. 2 No. 1, 2020.

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K5-RJ-20200827-121609-5828.pdf>  
(Diakses pada 22 Januari 2025 pukul 14.55 WIB).

<https://diklatlpkn.id/2023/06/22/permasalahan-utama-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah-dan-cara-mengatasinya/> (Diakses pada 11 Februari 2025 pukul 16.55 WIB).

<https://news.detik.com/berita/d-7161320/ombudsman-banten-soroti-proyek-jalan-tak-beres-di-kota-serang#:~:text=Dia%20juga%20menyebut%20ada%2013,di%20K>

